

SISTEM PEMERINTAHAN KERAJAAAN MAJAPAHIT

Ranti Sabariani¹, Retno Susanti², Hudaibah³

^{1,2,3}Pendidikan Sejarah, Universitas Sriwijaya, Jl. Masjid Al-Ghazali, Bukit Lama, Kec. Ilir Bar. I, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30128

e-mail: rantisabariani@gmail.com¹, retno-sutikno@gmail.com², hudaibah@fkip.unsri.ac.id

Abstrak

Majapahit merupakan Kerajaan yang pernah ada dan terletak di daerah jawa bagian timur, Indonesia yang muncul sekitaran tahun 1293-1550 Masehi. Kerajaan majapahit memiliki pemerintahan dan birokrasi yang terstruktur berdasarkan konsep kosmologis kepercayaan. Raja yang disamaikan dengan dewa tertinggi dan pusat pengabdian. Mengalami puncak kejayaan pada masa kepemimpinan Sri Rajasanagara atau yang lebih dikenal dengan Hayam Wuruk, dan kemundurannya karena masalah eksternal dan internal. Tujuan dari penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui sistem pemerintahan dan Sejarah majapahit.

Kata Kunci: Sejarah, pemerintahan majapahit

Abstract

Majapahit is a kingdom that once existed and was located in the eastern part of Java, Indonesia which appeared around 1293-1550 AD. Majapahit kingdom has a structured government and bureaucracy based on the concept of cosmological beliefs. The king is equated with the supreme god and the center of devotion. Experienced the peak of glory during the leadership of Sri Rajasanagara or better known as Hayam Wuruk, and its decline due to external and internal problems. The purpose of writing this article aims to find out the government system and history of Majapahit.

Keywords: History, majapahit government

1. PENDAHULUAN

Majapahit merupakan Kerajaan yang pernah ada dan berpusat di daerah Timur pulau Jawa, Indonesia. Yang mulai muncul dari sekitar tahun 1293-1550 Masehi. Merupakan Kerajaan yang memiliki corak Hindu-Budha terakhir, yang mampu memiliki kekuasaan di Nusantara dan dianggap sebagai Kerajaan terbesar di Indonesia. Puncak kejayaan (pamor, kesohoran, keagungan) terjadi sekitar tahun 1350 sampai 1389. Diera masa kepemimpinan Sri Rajasanagara atau yang kerap dikenal dengan nama Hayam Wuruk [1].

Bukan warisan dari Kertanegara karena Kerajaan Majapahit bediri dan didirikan sendiri oleh Raden Wijaya/ Naraya Sangramawijaya. Sebelum serangan Jayakatwang menghancurkan kerajaan Singasari, Kertanegara dan permaisurinya wafat. Setelah melarikan diri dari *Rabut Carat ke Pamawaran, Trung, Kulwan, dan Kembang Sari*, Raden Wijaya dan pengikutnya dikejar oleh musuh mereka. Setelah melarikan diri di wilayah-wilayah ini, mereka kembali ke Desa Kudadu sampai akhirnya Raden Wijaya disarankan untuk meminta bantuan Aria Wiraraja di Madura. Setelah tinggal di Madura, atau lebih tepatnya di wilayah Aria Wiraraja, mereka membuat rencana untuk merebut kekuasaan Japara. Raden Wijaya berpura-pura takluk pada Jayakatwang dengan segala tipu muslihatnya [2]. Jayakatwang menerima mereka sebagai pengabdian. Tanah juga diberikan kepada Raden Wijaya. Salah seorang pasukan Raden Wijaya menemukan buah maja saat mereka membuka hutan Tarik. Meskipun Raden Wijaya memakannya, rasanya pahit. Akibatnya, daerah hutan Tarik ini diberi nama Majapahit [3].

Tentara Tartar tiba di Jawa pada tahun 1293 dengan tujuan menyerang. Mereka mundur dari wilayah Singasari. Setelah Jayakatwang runtuh, Raden Wijaya/ Naraya Sangramawijaya menobatkan dirinya menjadi Raja Majapahit. Gelar Kertarajasa Jayawardhana diberikan kepada Raden Wijaya saat dia naik tahta [3].

2. METODE

Tulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memanfaatkan penelitian pustaka sebagai kerangka metodologinya. Penelitian pustaka melibatkan evaluasi dan penilaian ulang literatur yang diterbitkan sebelumnya oleh akademisi atau peneliti lain, yang dilakukan sebelum, selama, atau setelah proses penelitian. Biasanya, peneliti diharuskan untuk mengumpulkan tinjauan sebelumnya yang berkaitan dengan pokok bahasan yang diteliti. Secara umum, penelitian pustaka merupakan komponen pendahuluan dalam proposal dan laporan penelitian. Proses penyusunan tinjauan pustaka sama dengan mensintesis berbagai temuan penelitian sebelumnya untuk mendapatkan wawasan tentang topik atau isu yang diteliti, serta untuk mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi pada awal penelitian. [4].

3. PEMBAHASAN

3.1 RAJA RAJA MAJAPAHIT

Raja memegang kekuasaan politik tertinggi dan dianggap sebagai representasi dewa di dunia. Data sejarah menunjukkan bahwa raja-raja berikut pernah memimpin kerajaan Majapahit. 12 raja bertanggung jawab atas majapahit secara berurutan. Mereka adalah dyah Wijaya, jayanagara, tribuna tunggadewi, hayam wuruk, wikramawardhana,sri suhita, dyah kertawijaya, rajasawardhana,girishawardana,singhawikramawardhana, bhre kertabhum, girindrawardhana, dan dyah kertawijaya [5].

- 1) Raden Wijaya/Naraya Sangramawijaya pendiri Kerajaan Majapahit (1293-1309)
- 2) Jayanagara/Abhiseka ananta Wikramatunggadewa.Raja ke II (1309-1328)
- 3) Tribwuana Tunggadewi Maharajasa Jayawisnuwardhani Raja ke III (1328-1350)
- 4) Abhiseka Maharaja Sri Rajasanagara/Hayam Wuruk.Raja ke IV (1350-1389)
- 5) Wikramawardhana/Bhra hyang wisesa ajiwikrama.Raja ke V (1390-1428)
- 6) Bhatara Prameswara/Sri Suhita Raja ke VI (1429-1447)
- 7) Dyah Kertawijaya .Raja ke VII(1447-1451)
- 8) Rajawardhana Raja ke VIII (1451-1453),kekosongan kekuasaan (1453-1456)
- 9) Girishawardhana Raja ke IV setelah menaklukan Rajasawardhana Dyah Suryawikrama (1456-1462)
- 10) Singhawikrama Wardhana X(1466-1474)
- 11) Bhre Kertabhum raja ke XI
- 12) Girindrawardhana Raja ke XII (1486-1517).

3.2 SISTEM BIROKRASI KERAJAAN MAJAPAHIT

Kerajaan Majapahit mempunyai dan memegang pemerintahan dan susunan birokrasi yang bersifat territorial dan disentralisasi dengan birokrasi yang terperinci (akurat,ekspresif,tersurat). Dikatakan bahwa struktur pemerintahannya menunjukkan kekuasaan yang bersifat teritorial dan disentralisasikan dengan birokrasi yang terperinci berdasarkan konsep kosmologis .Raja yang disamakan dengan dewa tertinggi [6].Pemerintahan Majapahit menunjukkan birokrasi teritorial dan terperinci, yang disebabkan oleh kepercayaan kosmologis. Raja menjadi pusat pengabdian dan pemujaan rakyat, serta mempunyai struktur sistematis pemerintahan Kerajaan Majapahit, seorang pemimpin/Raja dibantu oleh beberapa tokoh birokrasi untuk menjalankan pemerintahannya,dan biasanya yang menepati kedudukan tertinggi adalah para putra Raja dan kerabat dekat Raja. Sistem birokrasi yang ada yakni sebagai berikut:

- 1) Kedudukan Raja Majapahit

Raja Majapahit adalah raja dan pemimpin negara, berdasarkan keturunan mereka sendiri, kecuali Raja Kertajasa, raja pertama Majapahit, yang menjadi raja setelah mengalahkan Jayakatwang dari Kediri dan membangun kerajaan sendiri. Di pusat pemerintahan, raja memegang posisi tertinggi. Keputusan raja menentukan semua kebijakan yang bertentangan dengan politik pemerintahan, dan para menteri dan petinggi istana tidak dapat menentangnya [1].

2) Kedudukan Kerabat Raja

Di dalam istana, raja berbicara dengan kerabatnya sebelum membuat keputusan penting. Musyawarah ini khusus untuk keluarga, jadi menteri atau petinggi istana tidak diundang. Misalnya, raja dan keluarganya bermusyawarah di dalam istana saat memilih pengganti untuk Patih Amangku Bumi Gadjah Mada yang telah mangkat.

3) Mahamantri Katrini

Dewan ini telah ada sejak awal pemerintahan Majapahit, bukan baru. Serat Kekancingan Penanggungan dan Kekancingan Kudadu mengandung nama pejabat Mahamantri Katrini. Raja memberikan perintah langsung kepada Mahamantri Katrini. Kemudian, melalui ketuanya, Rakryan Mahamantri I Hino, dia meminta dua anggotanya, yakni Rakryan Mahamantri I Halu dan Rakryan Mahamantri I Sirikan, untuk merealisasikan perintah yang telah ditentukan.

4) Sang Panca Wilwatikta

Dalam sebuah pupuh, disebut sebagai patih, demung, Kanuruhan, rangga, dan tumenggung. Keputusan dan kebijakan raja dilaksanakan oleh kelima pembesar tersebut. Mereka adalah pembantu utama raja, dan posisi mereka hampir sama dengan dewan mahamantri katrini.

5) Kedudukan Wreda Mahamantri Agung

Wreda Mahamantri Agung adalah menteri sepuh yang memiliki posisi yang sangat tinggi dalam pemerintahan Majapahit dan sangat dekat dengan raja. Ini dapat dilihat dari fakta bahwa Empu Tandi pernah menjabat jabatan tersebut setelah Patih Amangku Bumi Gadjah Mada meninggal. Selama menjabat di sana, Empu Tandi selalu mendapatkan tempat yang istimewa di depan raja.[7].

Dibawah Raja ada beberapa pengurus dan pengelolah daerah yang dikenal sebagai “*Paduka Bahttara*”, yang memegang daerah-daerah tersebut. Biasanya, orang-orang ini adalah saudara laki-laki atau kerabat dekat raja, yang ditugaskan atau bertanggung jawab untuk mengumpulkan pendapatan kerajaan, membayar pajak , dan menjaga,melindungi kerajaan di wilayah yang telah ditentukan. Prasasti Wingun Pitu dari tahun 1447 Masehi menunjukkan bahwa pemerintahan Majapahit diorganisasikan menjadi 14 daerah bawahan, yang masing-masing diawasi oleh seorang pemimpin yang bergelar Bhre. Daerah-daerah tersebut meliputi;*Daha, Jagaraga, Kabalan, Kahuripan, Keling Kelinggapura, Kembang Jenar, Matahun, Pajang, Ibid, Pajang, Singhapura, Tanjungpura, Tumapel, Wengker, dan Wirabumi*.[5].

Ada beberapa hal yang harus tertanam didalam diri seorang pemimpin , bertujuan agar menjadikan Kerajaan yang dihormati,dikhidmati,dipatuhi rakyatnya dan disegani oleh Kerajaan-kerajaan lainnya. Seorang pemimpin harus melakukan keenam upaya ini [6].

- Sidi Wasesa: yang berarti bahwa pemimpin harus dekat dengan Masyarakat yang dipimpinnya.
- Wigraha Wasesa: adalah seorang pemimpin yang mampu menjaga hubungan dengan orang lain.
- Wibawa Wasesa: pemimpin yang harus mempunyai wibawa dan dihormati oleh rakyat, jiran.
- Wunaya Wasesa: menyatakan bahwa pemimpin harus bijak dan cerdas sehingga memenuhi kebutuhan semua pihak.
- Gasraya Wasesa: berpendapat bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan untuk menghadapi tantangan.musuh.
- Stana Wasesa:Seorang pemimpin yang harus mampu mempertahankan perdamaaian serta memperkuat persahabatan.

3.3 MASA KEJAYAAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Pemerintahan Ratu Tribhuwana Wijayatunggadewi, ibunda Hayam Wuruk, Majapahit mulai memperluas kekuasaannya ke luar Jawa, termasuk Bali. Serangan ke Bali dengan pimpinan mahapatih *Gajahmada* dan *Arya Wangsadiraja Adityawarman*, saudara kandung ratu Minangkabau. Menurut uraian, Sri Asa Asura Ratna Bhumi Banten memerintah Bali pada saat itu. Nagarakertagama, dia bertindak jahat dan Nista, dan karena itu harus dihancurkan.Pararaton mengatakan bahwa Sumpah Gajah Mada yang terkenal selama pemerintahan Tribhuwana Wijayatunggadewi [8].

Dimasa kepemimpinan Sri Rajasanagara/Hayam Wuruk.Wilayah kekuasaan Karajaan Majapahit membentang luas dari Sumatra,Jawa,Semenanjung Malaya,Kalimantan,bahkan hingga di

wilayah Indonesia Timur [9]. Selain itu, sastra berkembang pesat. Perkembangan Selain itu, jalur perdagangan rempah-rempah Maluku dan pertanian di lembah sungai brantas menunjukkan peningkatan ekonomi.Peningkatan ekonomi Semakin kompleks, semakin tinggi kebutuhan akan uang, dan raja harus mengimport perunggu Tiongkok [6].

Pada era Hayam wuruk “Keraton” Majapahit dipindahkan ke Trowulan (saat ini merupakan bagian dari daerah Mojokerto, Jawa Timur) [10]. Raja Hayam Wuruk menjabat sebagai pemimpin Majapahit pada tahun 1350 dan mengangkat Majapahit ke puncak kesuksesannya sepanjang empat dasawarsa berasama patih Gajah mada. Gajahmada, bupati dan patih Majapahit berkuasa dari 1331 hingga 1364, memperluas kerajaan Majapahit kepulau-pulau di dekatnya [5].

Masyarakat Majapahit pada umumnya beragam. Kerajaan Majapahit memiliki keragaman yang berbeda karena ukurannya yang besar dan beragam. Latar belakang budaya orang-orang di pedalaman yang lebih agraris berbeda dengan orang-orang di dekat Pelabuhan pesisir pantai yang lebih perdagangan. Masyarakat di pegunungan/pedalaman lebih tertutup terhadap kebudayaan asing, sementara masyarakat di daerah pesisir pantai lebih sering berhubungan langsung dengan para pendatang asing. Toleransi adalah bagian penting dari keagamaan Majapahit. Dalam struktur pemerintahannya, majapahit mempekerjakan pejabat agama untuk mengakui dan menghormati agama Hindu dan Buddha. Sebagai pemimpin, Sri Rajasanagara bukan hanya berfokus pada ketatanegaraan untuk memperkuat pengamanan dan perlindungan negara bagiannya. Dengan meningkatkan pertahanan dan keamanan, Majapahit di masa pemerintahannya aman dari ancaman domestik dan internasional. Pemberontakan tidak terjadi di dalam atau di luar Majapahit. Ekonomi Majapahit bergantung pada kerja sama dengan Negara lain. Negara yang berdekatan dengannya. Karena Majapahit membutuhkan hal tersebut untuk sumber barang dagangan yang sangat laris di pasar. Barang dagangan termasuk; *beras, lada, gading, timah, besi, intan, ikan, cengkeh, pala, kapas, dan kayu cendana*. Dengan menjadi produsen dan perantara, penjahit juga memainkan peran penting dalam perdagangan. [11].

Selama pemerintahannya, tujuan hayam wuruk adalah untuk meningkatkan kemakmuran rakyat melalui berbagai upaya dan tindakan [12].

- 1) perjalanan kedaerah daerah
- 2) hubungan pemerintahan pusat dengan daerah
- 3) kerukunan antar umat beragama
- 4) perpajakan
- 5) pembangunan infrastruktur
- 6) penegakan peraturan perundang undangan
- 7) hidupnya perniagaan
- 8) struktur pemerintah dan birokrasi

3.4 MASA KEMUNDURAN KERAJAAN MAJAPAHIT

Patih Amungkubumi wafat disekitar tahun 1364 Raja Sri Sanagara /Hayam Wuruk kehilangan sumber kekuatan penting bagi pemerintahannya di Majapahit. Setelah Patih Amungkubumi meninggal, Raja Sri Rajasanagara/Hayam Wuruk memutuskan untuk memanggil Dewan Sapta Prabu agar memutuskan penggantinya. Akan tetapi, belum ada yang dapat mengambil alih posisi Patih Gajah Mada. Punala Tanding memilih 4 menteri. Tidak lama kemudian, Gajah enggon dan Gajah manguri menggantikan keempat menteri sebelumnya. Akhirnya, Hayam Wuruk mengganti Gajahmada dengan Gajah Enggon sebagai patih mangkubumi. Setelah wafatnya, ibunda Sri Rajasanagara/ Raja Hayam Wuruk (Sri Gitarja), di tahun 1379 M, keadaan Majapahit menjadi lebih buruk. Kerajaan semakin kehilangan pembantu-pambantu yang berbakat. Setelah wafatnya, Kemerosotan kerajaan Majapahit menjadi semakin jelas.

Setelah Sri Rajasanagara/ Hayam Wuruk meninggal, putrinya, Kusuma Wardhani, mengambil alih kekuasaan kerajaan Majapahit. Putri itu berkeluarga dengan Wikrama Wardhana. Antara tahun 1389 dan 1429 M, Wikrama Wardhana memerintah kerajaan Majapahit. Akan tetapi, Maharaja Sri Rajasanagara juga mempunyai seorang putra anak dari hubungan dengan selir yang berjenama Wirabhumi. Wirabhumi diberi keadikuasaan di ujung timur Pulau Jawa, di daerah yang sekarang dikenal sebagai Blambangan. Pada awalnya, Wikrama Wardhana dan Wirabhumi memiliki hubungan

yang baik satu sama lain. Namun, Wikrama Wardhana berencana menjadi bhiksu disekitar 1400 M, sementara Kusuma Wardhana meninggal. Ini menyebabkan pemerintahan Majapahit tidak stabil. Dengan memanfaatkan kesempatan ini, Wirabhumi mengambil alih kekuasaan Majapahit, menyebabkan Perang Paregreg 1401 sampai 1406 M. Wirabhumi mati pada saat berperang. Walaupun Perang Paregreg telah berakhir, Majapahit masih terus melemah. Setiap daerah yang berkuasa mulai menjauhi pemerintahan pusat [5].

Setelah itu, berbagai konflik dan perang saudara, seperti Perang Paregreg 1404–1406, menyebabkan Majapahit kehilangan kontrol atas lebih banyak wilayah, membuat setiap wilayah menjadi negara independen (Adolph, 2016). Dari berita tradisi, Kerajaan Majapahit terguling(kan) di tahun 1400 dikarenakan serangan dari Kerajaan Demak, yang digambarkan dalam Candrasengkala sebagai "sirna-ilang-kertaning bhumi." tetapi berdasarkan bukti sejarah. Menurut Prasasti Girindrawarddhana tahun saka 1408 M, ia masih disebut sebagai "Sri maharajasri wilwatikta". Ini menunjukkan bahwa kerajaan Majapahit masih berdiri pada tahun 1486 M. Di tahun 1519 M, ketika Pati Unus dari Demak menaklukan Majapahit, kerajaan baru runtuh. Saat itu terjadi pergeseran politik dan ekonomi di Asia Tenggara, yang berdampak pada wilayah pesisir utara Jawa disertai dengan pertumbuhan Islam yang signifikan diawal abad ke-16 [12].

4. KESIMPULAN

Kerajaan Hindu-Budha terakhir Majapahit bertepat didaerah jawa bagian timur, berdiri kurang lebih dari 1293 sampai 1550. Kerajaan ini diduga sebagai Kerajaan tersebar yang pernah berdiri dinusantara. Memperoleh mencapai puncak kejayaan (kesemarakan, pamor, keemasan, kehebatan) pada saat era kepemimpinan Maharaja Sri Rajasanagara atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hayam Wuruk. Yang berkuasa sekitar tahun (1350 sampai dengan 1389). Pemerintahan dan susunan (birokrasi) Majapahit sangat teratur. Dikatakan bahwa struktur pemerintahannya menunjukkan kewenangan; territorial dan disentralisasi melalui birokrasi yang terperinci; tercatat, tersurat, tertulis yang didasarkan pada kosmologis. Kasta Raja di Majapahit sebanding atau disamakan bak dewa tertinggi. dewa tertinggi.

Mahapatih GajahMada mengangkat sumpah Palapa, yang berbunyi: "*Lamun huwus kalah Nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa.*" Seturut Dalam sumpahnya, Gajah Mada menyatakan bahwa sepuluh wilayah di seluruh Nusantara harus mengakui kekuatan Majapahit: *Gurun (Lombok), Seran (kepala burung di Papua), Tanjung Pura (Kalimantan), Haru (Sumatera Utara), Pahang (Semenanjung Melayu), Dompo (Sumbawa, dekat Bima), Sunda (Jawa Barat), Bali, Palembang (Sumatera Selatan), dan Tumasik (Singapura)*". Di masa itu, Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang luas berkat Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. dan kapal perang yang kuat. Dikepemimpinan tokoh sejarah ini, rakyat makmur dan toleran. [11]

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “20695-64635-2-SP (1).”
- [2] Nazhat Afza Mualifah, “Peranan Banyak Wide (Nazhat Afza Mualifah) 460,” *J. Prodi Ilmu Sej.*, vol. 3, no. 4, pp. 460–474, 2018.
- [3] V. Alapján-, “Kerajaan Majapahit: Pengertian dan sejarah,” pp. 1–23, 2016.
- [4] M. Mahanum, “Tinjauan Kepustakaan,” *ALACRITY J. Educ.*, vol. 1, no. 2, pp. 1–12, 2021, doi: 10.52121/alacrity.v1i2.20.
- [5] Z. Setiawan, “Sejarah Sosial Politik Kerajaan Majapahit,” *J. Lanskap Polit.*, vol. 1, no. 1, p. 110, 2022, doi: 10.31942/jlp.2022.1.1.8124.
- [6] M. Nurun, A. Nuur, and Fahruddin, “Sistem Pemerintahan dan Politik yang diterapkan di Kerajaan Majapahit (dibawah Kepemimpinan Raja Hayam Wuruk),” *FisiPublik J. Ilmu Sos. dan Polit.*, vol. 8, no. 1, pp. 2–12, 2023, [Online]. Available: <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- [7] I. G. w Winsuwardana, “Birokrasi Tradisional Kerajaan Majapahit,” *Soc. Stud.*, vol. 5, no. 2, pp. 1–12, 2017.

- [8] A. A. Munandar, *Ibukota Majapahit: Masa Jaya dan Pencapaian*. 2008. [Online]. Available: <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272582608512>
- [9] T. Fatchur Rozi, M. Munir, and D. Maulidia, “Sistem Tata Kota Kerajaan Majapahit dalam Kakawin Nāgarakṛtāgama,” *SULUK J. Bahasa, Sastra, dan Budaya*, vol. 1, no. 2, pp. 77–86, 2019.
- [10] V. O. Anggraeni and D. Handayani, “Perancangan Buku Informasi Situs Candi Majapahit di Trowulan,” *Vis. Herit. J. Kreasi Seni dan Budaya*, vol. 3, no. 1, pp. 35–44, 2021, doi: 10.30998/vh.v3i1.3212.
- [11] A. Susilo and A. Sofiarini, “Gajah Mada Sang Maha Patih Pemersatu Nusantara di Bawah Majapahit Tahun 1336 M - 1359 M,” *KAGANGA J. Pendidik. Sej. dan Ris. Sos.*, vol. 1, no. 1, pp. 62–71, 2018, doi: 10.31539/kaganga.v1i1.233.
- [12] T. Haryono, “Kerajaan Majapahit: Masa Sri Rajasanagara sampai Girindrawarddhana,” *Humaniora*, vol. 5, pp. 107–113, 1997.